

EXECUTIVE SUMMARY

KAJIAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DI KABUPATEN MUARAENIM: PERSPEKTIF SEKTOR UMKM

A. Latar Belakang

Virus telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronacirus disease* 2019 atau yang di sebut dengan Covid-19. Pandemi Covid-19 membawa perubahan negative pada Kesehatan dan perekonomian secara global. Berbagai negara telah melakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan kegiatan perekonomian dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19. perkembangan kasus terkonfirmasi Covid-19 secara kumulatif di Provinsi Sumatera Selatan per tanggal 30 April 2020 hingga 31 Juli 2022. Per tanggal 31 Juli 2022, kasus terkonfirmasi sebanyak 80.950 jiwa dimana sebanyak 77.355 jiwa dinyatakan sembuh, 243 jiwa dalam perawatan dan 3.352 jiwa meninggal dunia.

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Muara Enim sebesar 7,02 persen kemudian pada tahun 2020 adanya penyebaran Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,03 persen dan sebanyak 226 jiwa terkonfirmasi kasus Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 memberikan berdampak terganggunya *supply chain* pada sektor ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, penurunan kesejahteraan dan peningkatan kemiskinan. Perkembangan kasus Covid-19 pada tahun 2021 meningkat secara cepat menjadi 3.781 jiwa kasus terkonfirmasi namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim mengalami pemulihan dengan tumbuh sebesar 5,75 persen. Pertumbuhan ekonomi didorong adanya kebijakan vaksinasi dan new normal yang dilakukan pemerintah sehingga aktivitas perekonomian dan masyarakat kembali tumbuh. Per tanggal 22 Juni 2022 secara kumulatif kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Muara Enim sebanyak 5.039 jiwa dimana sebesar 95,56 persen dinyatakan sembuh, sebanyak 5,26 persen meninggal dunia dan sebanyak 0,18 persen masih dalam perawatan.

Berdasarkan tipologi Klassen daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 bahwa Kabupaten Muara Enim termasuk dalam klasifikasi tipe II atau daerah berkembang cepat. Pada klasifikasi tipe II hanya terdapat Kabupaten Muara Enim dan

kemungkinan kedepan memiliki potensi menjadi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Muara Enim terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021, hal ini dikarenakan adanya potensi dan sumber daya dari setiap kecamatan. Jumlah UMKM di tahun 2018 meningkat menjadi 5818 UMKM, peningkatan tersebut dilihat dari jumlah usaha mikro yang bertambah sebesar 585. Namun pada tahun tersebut tidak ada peningkatan jumlah UMKM berdasarkan jenis usaha kecil dan menengah. Jenis usaha mikro dan usaha kecil meningkat pesat di tahun 2019, tercatat adanya peningkatan sebesar 1.636 menjadi 6878 Usaha Mikro dan peningkatan sebesar 153 menjadi 619 Usaha Kecil. Kehadiran Covid-19 diawal tahun 2020 mempengaruhi perekonomian Indonesia dan berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia termasuk kondisi ekonomi di level provinsi dan kabupaten. Perkembangan UMKM di Kabupaten Muara Enim tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 9.210 UMKM. Jenis usaha mikro meningkat sebesar 1.375 menjadi 8.253 usaha mikro selama pandemi Covid-19, muncul dugaan peningkatan tersebut diakibatkan oleh banyak karyawan yang harus dirumahkan bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kemudian beralih menjadi pelaku usaha mikro.

Pada tahun 2021 UMKM mengalami peningkatan tetapi tingkat pertumbuhan UMKM cenderung relatif menurun. Tercatat jumlah UMKM di Kabupaten Muara Enim tahun 2021 berjumlah 9.491 usaha yang terdiri dari 8.534 usaha mikro, 919 usaha kecil, dan 38 usaha menengah. Hal tersebut diakibatkan oleh kondisi ekonomi yang belum pulih pasca pandemi Covid 19 sehingga mempengaruhi kinerja dan produktivitas para pelaku usaha UMKM. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Muara Enim dapat menjadi salah satu program dalam menciptakan lapangan pekerjaan tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan dan keahlian khusus. Pengembangan UMKM dan potensi yang terdapat di Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat mendorong perekonomian di Kabupaten Muara Enim.

B. Tujuan dan Maksud Kajian

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini antara lain:

1. Memberikan gambaran Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Kabupaten Muara Enim Khususnya dibidang UMKM di Wilayah Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas.

2. Sebagai Referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintah untuk penanganan dampak Covid – 19 Terhadap UMKM.

Sedangkan tujuannya adalah;

1. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuh-kembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.
2. Agar Pelaku Usaha terutama UMKM yang mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah dapat berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Prespektif Ekonomi tentang Dampak Covid-19 Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM di Kabupaten muara Enim khususnya Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Ujan Mas;
4. Mengevaluasi Aktivitas Perekonomian akibat dari dampak Pandemi Covid-19;
5. Menyusun Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian di Kabupaten Muara Enim.
6. Membuat Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian di Kabupaten Muara Enim Khususnya UMKM yang dapat dijadikan bahan rekomendasi kepada stakeholder terkait.

C. Dampak Covid 19 terhadap UMKM di Muara Enim

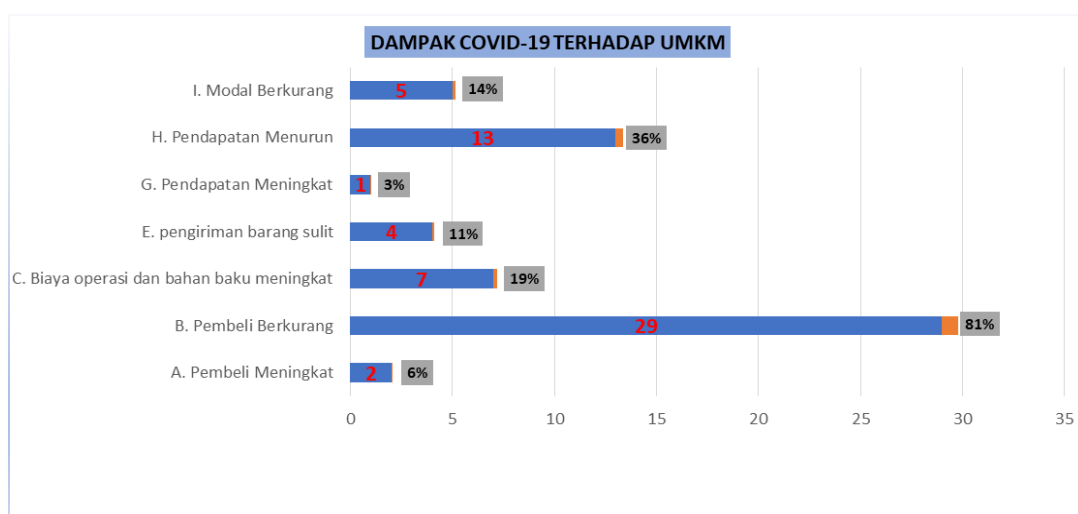
1. Aspek Keuangan

1.1. Aspek Pendapatan

Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM sangat besar, usaha UMKM ini dinilai sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Kontribusi usaha UMKM tercatat mencapai kisaran 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja (Kementrian Koperasi UMKM, 2022). Penurunan permintaan pasar selama pandemi Covid-19 akan berdampak pada kelangsungan UMKM berbagai wilayah termasuk Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan sebesar 81 persen UMKM terdampak Covid-19. Sub sektor ini mengalami penurunan jumlah pembeli karena adanya pembatasan mobilitas barang dan jasa.

Pembatasan mobilitas barang dan jasa berujung pada menurunnya pendapatan masyarakat dan diikuti oleh menurunnya daya beli masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

UMKM yang paling terdampak terjadi pada sektor jasa perdagangan, restoran dan akomodasi, utamanya pada bidang usaha kuliner. Hal tersebut terjadi seiring dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah antara lain mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Aktivitas sekolah, perkantoran, perhotelan, dan lainnya terpaksa terhenti dan hanya bersifat terbatas.



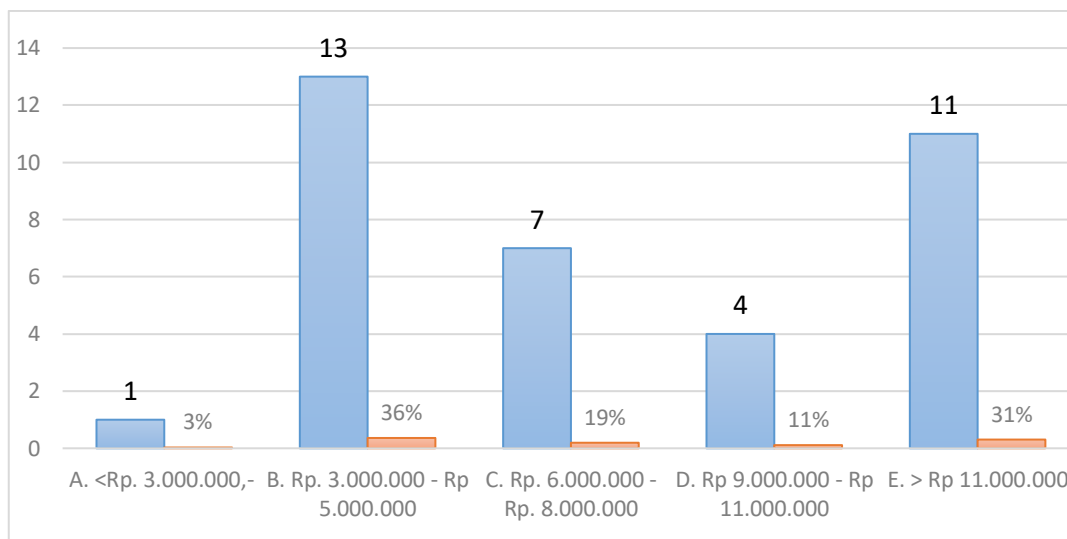
Gambar 1. Dampak Covid-19 terhadap UMKM Kabupaten Muara Enim

Sumber: Data Diolah (2022)

Hasil temuan pada gambar 1 membuktikan bahwa 19 persen UMKM mengatakan terdapat kenaikan biaya operasional dan peningkatan harga bahan baku. Hal ini berkaitan erat dengan proses distribusi bahan baku yang terhambat selama pandemi Covid-19. Proses pengiriman barang lebih lambat dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19. Dari aspek pendapatan, adapun hal-hal yang akan diulas dari UMKM antara lain jumlah pendapatan UMKM, tingkat keuntungan berdasarkan skala usaha, dan faktor penyebab penurunan pendapatan.

Selama Covid-19, UMKM di Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Gambar 2 menunjukkan kondisi pendapatan UMKM di Kabupaten Muara Enim sebelum Covid-19. Pendapatan UMKM sebelum Covid-19. Sebelum Pandemi, 36 persen responden memiliki pendapatan pada kisaran 3 juta sampai

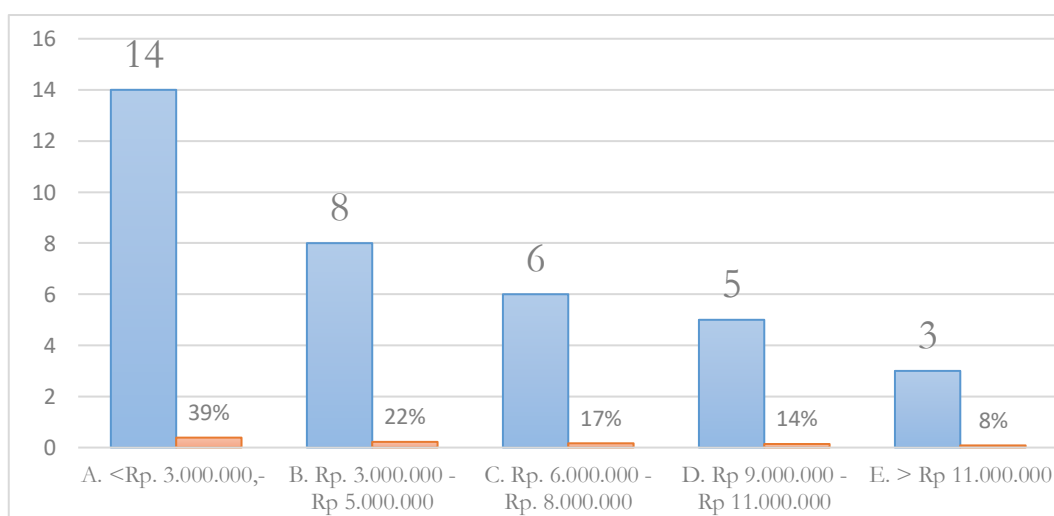
dengan 5 juta per bulan. Sedangkan 31 persen responden yang mayoritas berasal dari UMKM skala kecil memiliki pendapatan di atas 11 juta sebelum terjadi pandemi Covid-19.



Gambar 2. Kondisi Pendapatan UMKM Sebelum Covid-19

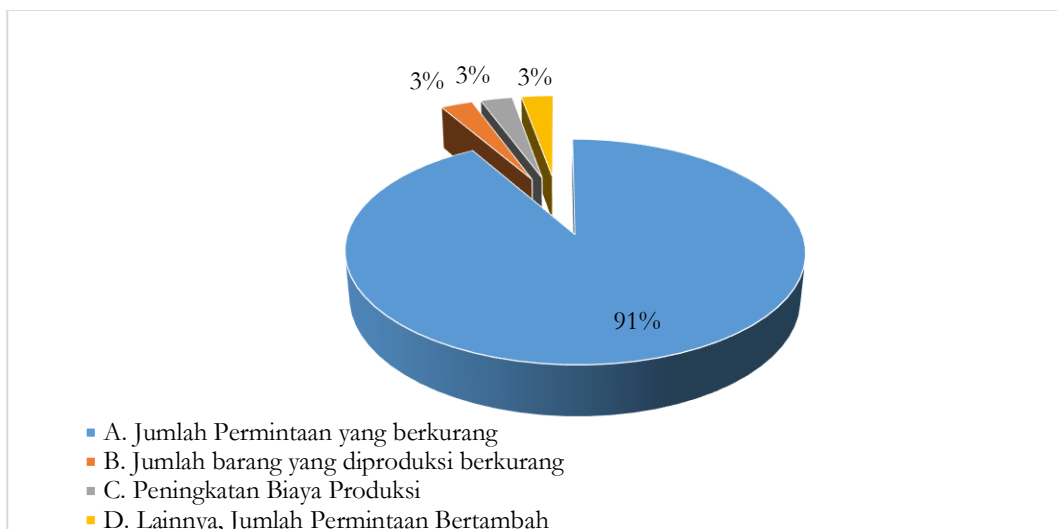
Sumber: Data Diolah (2022)

Gambar 3 menunjukkan bahwa pendapatan UMKM responden sebelum Covid-19 yang sebelumnya berada padakisaran Rp.3.000.000-Rp.5.000.000 menurun dari 36 persen menjadi 22 persen selama pandemi Covid-19. Selain itu, UMKM yang semula berpendapatan di atas 11 juta sebanyak 31 persen mengalami penurunan drastis menjadi 8 persen. Rata-rata pendapatan UMKM selama pandemi Covid -19 dibawah 3 juta. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan usahanya sangat jauh menurun dibandingkan sebelum terjadinya Covid-19.



Gambar 3. Kondisi Pendapatan UMKM Selama Covid-19

Sumber: Data Diolah (2022)



Gambar 4. Penyebab Penurunan Pendapatan

Sumber: Data Diolah (2022)

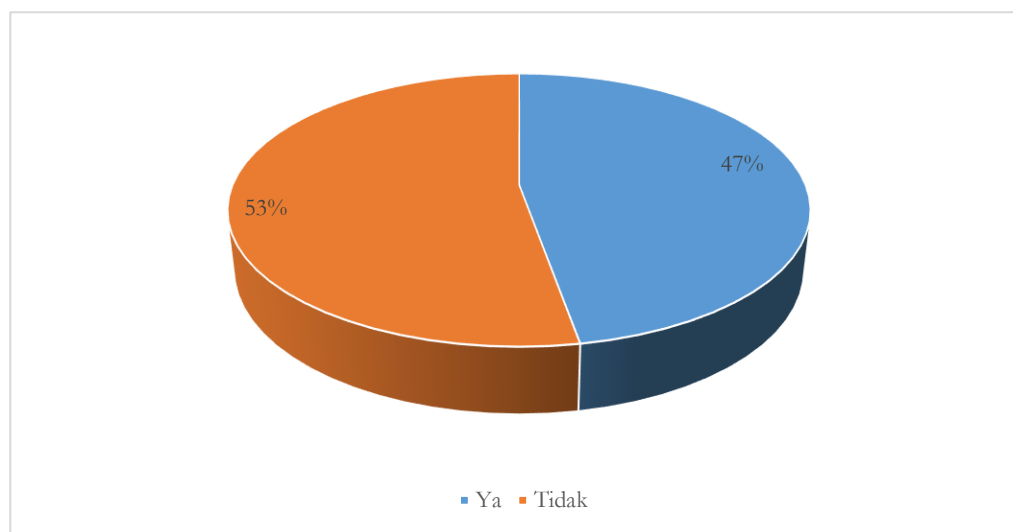
Gambar 4 menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan penurunan pendapatan adalah berkurangnya jumlah permintaan. Berdasarkan hasil lapangan, 91 persen UMKM menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 jumlah permintaan konsumen berkurang sangat tajam. Sebanyak 3 persen responden membatasi produksi barang atau produk mereka selama pandemi. Hal ini juga disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi sehingga para pelaku usaha terpaksa mengurangi produksi barang/produk mereka. Dengan demikian, pendapatan usaha UMKM dari responden sangat jauh merosot dari sebelum pandemi Covid-19.

1.2. Aspek Biaya

Tingginya jumlah pengeluaran atau biaya tidak sebanding dengan jumlah pendapatan UMKM selama pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, Mayoritas UMKM di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Ujan Mas memutuskan hubungan kerja sebagian karyawan mereka. Hal ini disebabkan ketidakmampuan UMKM membayar upah karyawan. Selain itu, beberapa UMKM juga memberlakukan system shifting pada karyawan mereka. Sektor yang paling berdampak adalah sektor Jasa perdagangan, restoran dan akomodasi.

Pada gambar 5 sebanyak 47 persen UMKM menyatakan memiliki hutang usaha. Hutang usaha ini berupa pinjaman modal baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank seperti Umi, pegadaian dan lainnya. Namun, kemampuan UMKM membayar

cicilan hutang selama pandemi terus merosot. 71% UMKM menegaskan bahwa mereka tidak mampu membayar cicilan secara rutin selama pandemi Covid-19.



Gambar 5. Kondisi Hutang Usaha
Sumber: Data Diolah (2022)

Dilihat dari sisi harga bahan baku, UMKM pada sektor industri mengkonfirmasi bahwa terdapat kenaikan harga-harga bahan baku seperti harga kedelai, harga cabai dan harga minyak goreng. Kenaikan harga bahan baku juga disebabkan oleh proses distribusi bahan baku yang melambat selama pandemi Covid-19. Namun, UMKM mengaku selama pandemi Covid-19 terdapat pasar murah yang diadakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Muara Enim.

1.3. Aspek Permodalan

Kebutuhan akan permodalan tetap menjadi bahan pertimbangan UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik meskipun UMKM tidak membutuhkan modal yang sangat besar dibandingkan dengan industri besar. Mayoritas UMKM di Kabupaten Muara Enim masih sangat membutuhkan bantuan permodalan. Hasil temuan mengkonfirmasi bahwa sebagian besar UMKM mengharapkan adanya bantuan modal dari pemerintah baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19.

Responden UMKM menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh permodalan adalah sulitnya akses kredit kendala yang dihadapi, akses dan informasi fasilitas kredit. Dalam hal ini sebagian UMKM yang ada di Kabupaten Muara Enim mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi perbankan. Di sisi lain, responden mengkonfirmasi bahwa ada program kredit pemerintah tanpa agunan yang sangat

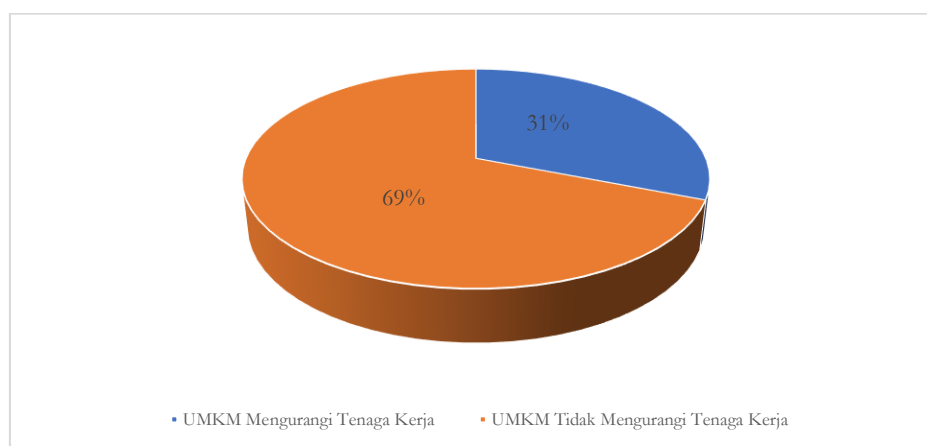
membantu seperti Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Dalam ini, pemerintah berperan dalam menyediakan akses permodalan bagi UMKM di Kabupaten Muara Enim.

Temuan menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan UMKM dalam mempertahankan usaha selama pandemi adalah menurunkan jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja serta mengadopsi teknologi baru. Sebagian sektor usaha UMKM di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas menerapkan penjualan online melalui social media.

2. Aspek Non-Keuangan

2.1. Aspek Tenaga Kerja

Penurunan permintaan dan penjualan selama pandemi Covid-19 menyebabkan kebutuhan akan produksi barang dan jasa menjadi menurun. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang akan mempengaruhi output produksi yang dihasilkan. Implikasinya adalah adanya pengurangan jumlah karyawan yang berkerja pada sektor UMKM selama pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa bisnis telah mempertimbangkan pengurangan karyawan mereka. Oleh karena itu, riset ini akan mengkonfirmasi kondisi tenaga kerja UMKM selama pandemi di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas.



Gambar 6. Kondisi Tenaga Kerja UMKM Selama Pandemi Covid-19 di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas
Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan kuisisioner yang telah diisi oleh 36 UMKM yang dijadikan sebagai sampel di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas, kondisi tenaga kerja UMKM di

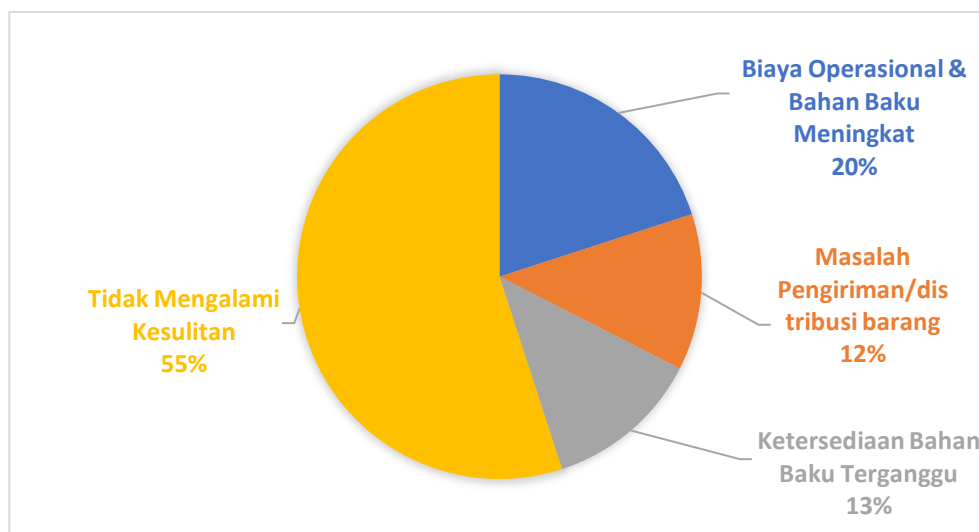
tiga kecamatan tersebut berjumlah 88 orang sebelum adanya pandemi Covid-19. Pada Gambar menunjukkan bahwa sebanyak 31 % UMKM mengurangi jumlah tenaga kerja selama pandemi. Penurunan jumlah pekerja UMKM paling banyak terjadi di Kecamatan Lawang Kidul. Sebagian besar UMKM mengalami penurunan permintaan.

Berkurangnya pembeli dan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang harus diproduksi oleh UMKM. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh UMKM mengalami penurunan yang drastis. Permasalahan ini membuat UMKM kesulitan untuk membayar gaji karyawan sehingga mengambil berbagai keputusan untuk tetap bertahan. Beberapa strategi yang dilakukan oleh pelaku industri kecil seperti mengurangi jumlah karyawan, mengurangi gaji karyawan dan mengurangi jam operasional kerja.

UMKM terdampak Covid-19 yang mengurangi jumlah karyawan bergerak di bidang jasa, perdagangan dan industri, dengan produk UMKM yaitu jasa dan makanan yang paling berdampak. Sebagai contoh, Usaha Pangkas yang beroperasi di Kecamatan Muara Enim mempunyai 7 orang tenaga kerja dan konsumen bisa mencapai 70 orang per hari sebelum adanya pandemi. Perubahan perilaku masyarakat karena takut melakukan kontak secara langsung sehingga membuat usaha pangkas rambut mengalami sepi pelanggan. Tidak hanya itu, usaha pangkas rambut ini juga mengurangi gaji para karyawan akibat dampak pandemi Covid-19. Hal serupa juga dilakukan oleh Industri Kripik Pangsit yang mengurangi jumlah tenaga kerja dan mengurangi gaji karyawan. Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap jam operasional kerja UMKM. Pengurangan jam kerja tidak sepenuhnya disebabkan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah daerah melainkan karena pelaku usaha mengalami penurunan dari sisi permintaan.

2.2. Aspek *Supply Chain*

Supply Chain Management (SCM) merupakan sistem yang melibatkan proses produksi, pengiriman, penyimpanan, distribusi, dan penjualan produk dalam rangka memenuhi permintaan akan produk tersebut. UMKM juga merupakan salah satu jenis usaha yang dituntut untuk meningkatkan kinerja supply chain yang dimilikinya. Oleh karena itu, riset ini juga menganalisis perkembangan SCM UMKM Kabupaten Muara Enim

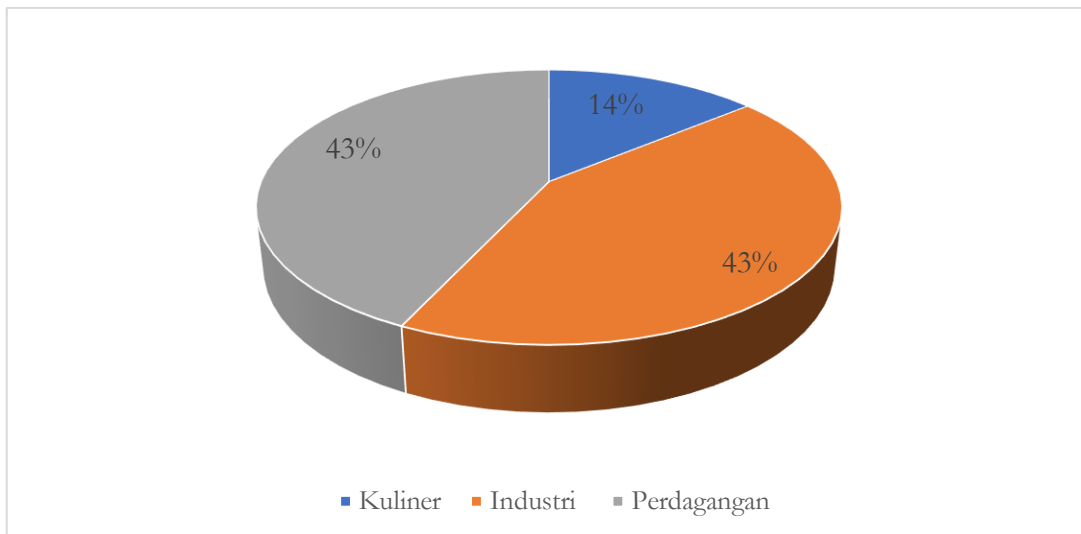


Gambar 7. Persentase UMKM di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas yang Mengalami Masalah *Supply Chain Management*

Sumber: Data Diolah (2022)

Pada Gambar 7 menunjukkan persentase UMKM di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas yang mengalami masalah *Supply Chain Management*. Sebanyak 55 persen UMKM tidak mengalami kesulitan dan 45 persen UMKM mengalami kesulitan terkait *Supply Chain Management*. Kesulitan tersebut antara lain meliputi biaya operasional dan bahan baku meningkat, terganggunya ketersediaan bahan baku dan masalah pengiriman/distribusi barang. Berdasarkan gambar, persentase UMKM yang mengalami masalah meningkatnya biaya operasional dan bahan baku selama pandemi sebanyak 20 persen UMKM. Dalam menjalankan usahanya, biaya operasional menjadi faktor penting dimana sejumlah pengeluaran berkaitan dengan biaya produksi yang merupakan biaya-biaya dalam pengelolaan bahan baku. Terkait masalah tersebut, selama pandemi Covid-19 pelaku UMKM didorong untuk bijak dalam mengelola dan memastikan modal serta menyusun anggaran biaya operasional dengan tepat.

Stabilitas jumlah bahan baku untuk keberlangsungan usaha menjadi salah satu unsur *Supply Chain Management*. Berdasarkan data statistik menunjukkan sebanyak 13 persen UMKM di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas selama pandemi mengalami masalah ketersediaan bahan baku. Jumlah barang yang akan diproduksi oleh UMKM sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang dimiliki. Wabah pandemi Covid-19 berdampak terhadap proses pengiriman/distribusi barang. Berdasarkan gambar, persentase UMKM di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas selama pandemi yang mengalami masalah pengiriman/distribusi barang sebanyak 12 Persen UMKM.



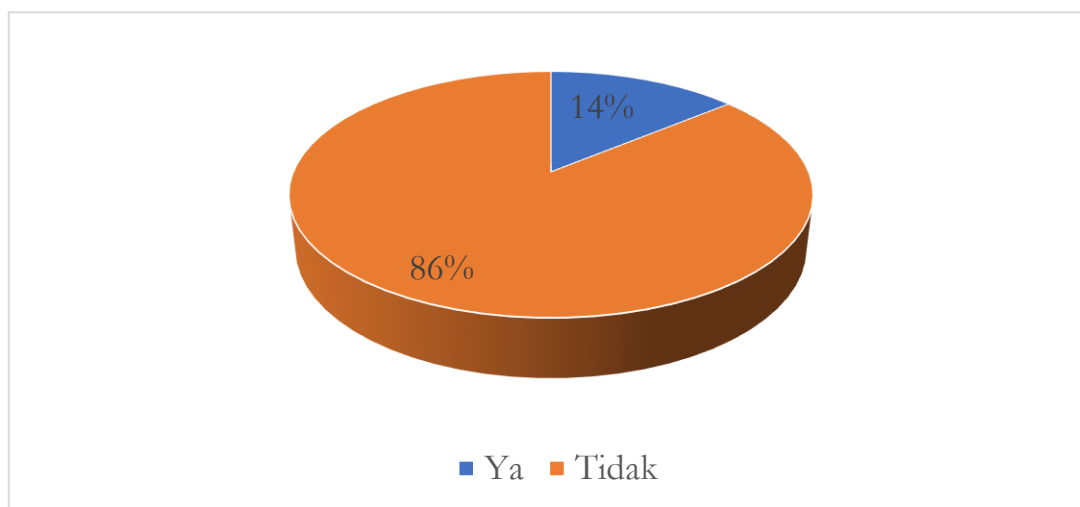
Gambar 8. Persentase UMKM di KEcamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas yang Mengalami Masalah *Supply Chain Management*
 Sumber: Data Diolah (2022)

Pandemi Covid-19 mempengaruhi lalu lintas barang yang diakibatkan oleh menurunnya produktivitas sektor-sektor lainnya dan kebijakan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah. PPKM yang diterapkan di wilayah Muaraenim dan di berbagai daerah lain yang menjadi rekan dagang menyebabkan angkutan barang mengalami kendala dalam pengiriman dan distribusi barang. Terlihat jelas bahwa sektor transportasi memiliki peran vital dalam proses distribusi barang sehingga hal tersebut menegaskan bahwa antara transportasi dan distribusi barang adalah satu kesatuan. Pada Gambar menunjukkan persentase UMKM di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas yang mengalami masalah *Supply Chain Management* berdasarkan bidang usaha. Sebanyak 43 Persen UMKM di bidang usaha industri, 43 Persen UMKM di bidang usaha perdagangan, dan 14 Persen UMKM di bidang usaha kuliner mengalami kesulitan terkait Supply Chain Management. Berdasarkan data statistik tersebut menunjukkan bahwa bidang usaha industri dan perdagangan sangat terdampak dan mengalami kesulitan *Supply Chain Management*.

2.3. Aspen Pemanfaatan Teknologi

Pandemi Covid-19 mendorong perubahan yang lebih pesat pada strategi bisnis. Strategi jangka panjang berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah

dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM. Riset ini akan menganalisis perkembangan pemanfaatan teknologi bagi UMKM di Kabupaten Muara Enim selama pandemi Covid-19.



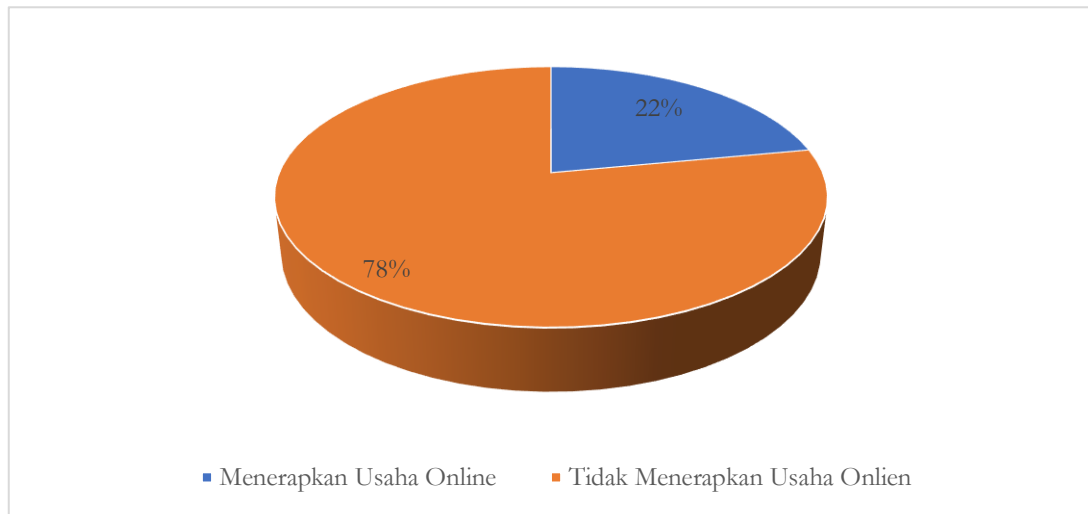
Gambar 9. Persentase UMKM Menggunakan Teknologi Terbaru Untuk Proses Produksi di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas

Sumber: Data Diolah (2022)

Pada Gambar 9 menunjukkan persentase UMKM yang menggunakan teknologi terbaru untuk proses produksi di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas. Sebanyak 86 Persen UMKM belum menggunakan teknologi terbaru dan 14 Persen UMKM menggunakan teknologi terbaru untuk proses produksi. Dengan menggunakan teknologi terbaru dapat menjadi solusi UMKM dalam efisiensi sumber daya produksi. Berdasarkan data statistik sebagian besar UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana. Masih sedikitnya UMKM yang menggunakan teknologi terbaru disebabkan produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk handmade dan kurangnya pengetahuan tenaga kerja UMKM mengenai teknologi produksi terbaru.

Pada Gambar 10 menunjukkan persentase UMKM yang menerapkan usaha online dalam proses produksi di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas. Sebanyak 78 Persen UMKM belum menerapkan usaha online dan 22 Persen UMKM menerapkan usaha online dalam proses produksi selama pandemi. Pelaku UMKM membutuhkan inovasi dan strategi sebagai solusi untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19 dengan beralih ke usaha online. Perubahan perilaku masyarakat dan adaptasi kebiasaan baru selama pandemi merubah pola konsumsi berbelanja secara daring. Hal tersebut dijadikan pelaku UMKM sebagai peluang untuk bertahan. Pelaku UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak

konsumen, dengan harapan meningkatkan potensi penjualan. Pemanfaatan media sosial menjadi sarana bagi UMKM dalam menjalankan usaha online secara digital.



Gambar 10. Persentase UMKM di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul, dan Ujan Mas Menerapkan Usaha Online Selama Pandemi
Sumber: Data Diolah (2022)

3. Hasil Pengujian Statistik

Uji *Wilcoxon* digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan untuk melakukan uji beda berpasangan pada satu sampel. Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan jumlah pendapatan umkm sebelum dan setelah ada Covid-19. Pemilihan uji *Wilcoxon* didasarkan pada data yang tidak terdistribusi normal. Uji nonparametric ini tidak mengasumsikan bahwa sampel terdistribusi normal (Krishnamoorthy, 2020).

Tabel 1 *Ranks* pendapatan sebelum-setelah ada Covid-19

		N	Mean Rank	Sum of <i>Ranks</i>
Setelah ada Covid - Sebelum ada Covid	Negative <i>Ranks</i>	35 ^a	18.37	643.00
	Positive <i>Ranks</i>	1 ^b	23.00	23.00
	Ties	0 ^c		
	Total	36		

a. Setelah ada Covid < Sebelum ada Covid

b. Setelah ada Covid > Sebelum ada Covid

c. Setelah ada Covid = Sebelum ada Covid

Berdasarkan hasil *ranks* pada pengujian Wilcoxon, nilai negative *ranks* menunjukkan selisih antara pendapatan setelah ada Covid-19 dan pendapatan sebelum ada Covid-19 yang

bernilai negatif sebanyak 35 data. Nilai Rata-rata untuk tanda negatif sebesar 18.37 sedangkan rata-rata nilai positif sebesar 23.00. Nilai positif *ranks* menunjukkan selisih antara pendapatan setelah ada Covid-19 dan pendapatan sebelum ada Covid-19 yang bernilai positif sebanyak 1 data. Tabel 1 juga menunjukkan antara pendapatan sebelum dan setelah ada Covid-19 tidak terdapat nilai yang sama.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan UMKM di Kabupaten Muara Enim

	Setelah ada Covid - Sebelum ada Covid
Z	-4.871 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

Sumber: Data Diolah (2022)

Hipotesis null menunjukkan pendapatan UMKM sebelum dan setelah ada Covid-19 tidak terdapat perbedaan. Sedangkan hipotesis alternative menunjukkan bahwa pendapatan UMKM sebelum dan setelah ada Covid-19 berbeda secara nyata. Berdasarkan pengujian statistik pada tabel 2, hasilnya menunjukkan nilai probabilitas (asyp. Sig) kurang dari 0.05 maka hipotesis null ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang nyata pada pendapatan UMKM sebelum dan setelah adanya Covid-19. Artinya pandemi Covid-19 berdampak negatif pada kinerja UMKM di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Ujan Mas.

UMKM di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas mengalami penurunan pendapatan dan penjualan yang signifikan dalam beberapa bulan pertama setelah merebaknya pandemi COVID-19. Yulianawati & Wanniatie (2021) juga membuktikan hal sama terjadi di Kabupaten Tulang Bawang. Penurunan pendapatan yang tajam mendorong UMKM untuk mengurangi karyawan mereka.

Berdasarkan hasil *ranks* pada pengujian Wilcoxon Tabel 3 nilai negative *ranks* menunjukkan selisih antara laba setelah ada Covid-19 dan laba sebelum ada Covid-19 yang bernilai negatif sebanyak 31 data. Nilai Rata-rata untuk tanda negatif sebesar 16.11 sedangkan Rata-rata nilai positif sebesar 28.50. Nilai positif *ranks* menunjukkan selisih antara laba setelah ada Covid-19 dan laba sebelum ada Covid-19 yang bernilai positif sebanyak 1 data. Tabel 3 juga menunjukkan antara terdapat 4 data yang nilai laba sebelum ada Covid-19 sama dengan setelah ada Covid-19. Dalam hal penurunan laba, lebih dari dua pertiga UMKM percaya bahwa selama tahun 2020 laba mereka berkurang lebih dari 60 Persen karena wabah Covid-19.

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan UMKM di Kabupaten Muara Enim

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of <i>Ranks</i>
Negative <i>Ranks</i>	31 ^a	16.11	499.50
Laba Setelah Ada Covid - Positive <i>Ranks</i>	1 ^b	28.50	28.50
Laba Sebelum Ada Covid Ties	4 ^c		
Total	36		

a. Laba Setelah Ada Covid < Laba Sebelum Ada Covid

b. Laba Setelah Ada Covid > Laba Sebelum Ada Covid

c. Laba Setelah Ada Covid = Laba Sebelum Ada Covid

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian statistik dampak Covid-19 terhadap laba UMKM di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Ujan Mas. Berdasarkan pengujian statistik tersebut, hasilnya menunjukkan nilai probabilitas (asympt. Sig) kurang dari 0.05 maka hipotesis null ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang nyata pada laba UMKM sebelum dan setelah adanya Covid-19. Artinya pandemi Covid-19 menurunkan laba UMKM di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Ujan Mas. Hasil ini menyiratkan bahwa sebagian besar UMKM rentan terhadap gangguan keuangan, gangguan rantai pasokan, dan kendala permintaan.

Tabel 4 Hasil Uji Statistik Dampak Covid-19 Terhadap Laba UMKM di Kabupaten Muara Enim

	Laba Setelah Ada Covid - Laba Sebelum Ada Covid
Z	-4.405 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed *Ranks* Test

b. Based on positive *ranks*.

Berdasarkan hasil *ranks* pada pengujian dampak Covid-19 terhadap tenaga kerja, nilai negative *ranks* menunjukkan selisih antara tenaga kerja setelah ada Covid-19 dan tenaga kerja sebelum ada Covid-19 yang bernilai negatif sebanyak 20 data. Nilai rata-rata untuk tanda negatif sebesar 16.11 sedangkan Rata-rata nilai positif sebesar 28.50. Nilai positif *ranks* menunjukkan selisih antara jumlah tenaga kerja setelah ada Covid-19 dan jumlah tenaga kerja sebelum ada Covid-19 yang bernilai positif sebanyak 1 data. Tabel 4 juga menunjukkan antara jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah ada Covid-19 yang bernilai sama sebanyak 15 UMKM.

Tabel 5 Hasil *Ranks* Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja UMKM

<i>Ranks</i>		N	Mean Rank	Sum of <i>Ranks</i>
Tenaga Kerja setelah ada Covid - Tenaga Kerja Sebelum ada Covid	Negative <i>Ranks</i>	20 ^a	10.55	211.00
	Positive <i>Ranks</i>	1 ^b	20.00	20.00
	Ties	15 ^c		
	Total	36		

a. Tenaga Kerja setelah ada Covid < Tenaga Kerja Sebelum ada Covid

b. Tenaga Kerja setelah ada Covid > Tenaga Kerja Sebelum ada Covid

c. Tenaga Kerja setelah ada Covid = Tenaga Kerja Sebelum ada Covid

Hasil uji statistik dampak pandemi Covid-19 terhadap jumlah tenaga kerja pada UMKM nampak pada Tabel 6. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa *P-value* sebesar .000. Angka ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja UMKM menurun saat adanya Covid-19 apabila dibandingkan dengan sebelum Covid-19.

Tabel 6 Hasil Uji Statistik Dampak Covid-19 terhadap Jumlah Tenaga kerja UMKM di Kabupaten Muara Enim

	Tenaga Kerja setelah ada Covid - Tenaga Kerja Sebelum ada Covid
Z	-3.594 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed *Ranks* Test

b. Based on positive *ranks*.

Hasil kajian menemukan bahwa lebih dari 55 persen UMKM di Kabupaten Muara Enim khususnya Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Ujam Mas mengurangi jumlah karyawan tetap. Sebagian besar terjadi pada sektor perdagangan, restoran dan akomodasi. Sejumlah UMKM terpaksa harus memotong jumlah karyawan tidak hanya sementara tetapi juga permanen. Namun, UMKM yang bergerak pada sektor industri menyatakan bahwa Covid-19 kurang berdampak pada jumlah karyawan mereka.

D. Efektivitas Program Pemerintah dan Rekomendasi Kebijakan

1. Efektivitas Program Pemerintah di Bidang UMKM

1.1. Program Strategis Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Kreatif

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Muara Enim Bupati terpilih periode 2018-2023 yang mengusung visi “Muara Enim Untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera”. Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi, antara lain: mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor

agribisnis, agroindustri dan agropolitan. Adapun program strategis yang dilakukan yaitu bidang ekonomi kerakyatan dan kreatif.

Tabel 7 Program Strategis Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Kreatif

Dinas Perdagangan	DPMD	UMKMK	Bappeda
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 3. Program Penataan Struktur Industri	1. Peningkatan keberdayaan lembaga ekonomi desa 2. Peningkatan Unit Usaha Bumdes 3. Pengembangan potensi Unggulan desa 4. Peningkatan saran dan Prasarana desa	1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 3. Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif 4. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKMK 5. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	1. Perencanaan pembangunan ekonomi (Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah) 2. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Penyusunan Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Sumber: RPJMD 2018-2023 Muara Enim

1.2. Masalah

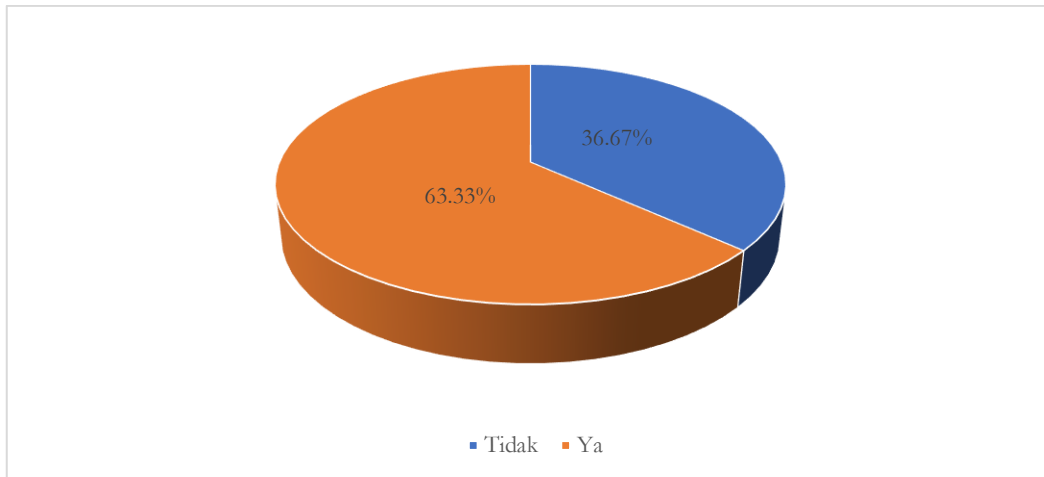
Permasalahan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Muara Enim yang mampu mendorong lahirnya wirausahawan yang tangguh dan mandiri.
2. Masih rendahnya daya saing dan kemandirian UMKMK Kabupaten Muara Enim.
3. Belum terstandardisasinya manajemen, produk dan sumberdaya manusia UMKMK Kabupaten Muara Enim.
4. Terbatasnya akses UMKMK Kabupaten Muara Enim terhadap sumber permodalan dan lembaga pembiayaan.
5. Terbatasnya jangkauan pemasaran produk UMKMK dan belum optimalnya jejaring bisnis (*networking*) UMKMK Kabupaten Muara Enim

6. Masih rendahnya penguasaan dan pemanfaatan iptek oleh UMKM dan berdampak pada belum efisiennya proses produksi barang/jasa yang dilakukan oleh UMKM Kabupaten Muara Enim.
7. Rendahnya daya inovatif dan kreatif UMKM dalam mengoptimalkan bahan baku lokal untuk menghasilkan produk berciri khas Kabupaten Muara Enim.
8. Masih rendahnya komitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai permintaan pasar dan rendahnya kepedulian UMKM terhadap kelestarian lingkungan.
9. Belum optimalnya inovasi pengembangan pasar, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM.
10. Sebagian besar UMKM memiliki legalitas usaha (ijin usaha dan badan hukum).
11. Kegiatan pemberdayaan UMKM Kabupaten Muara Enim belum terintegrasi dan berkelanjutan.

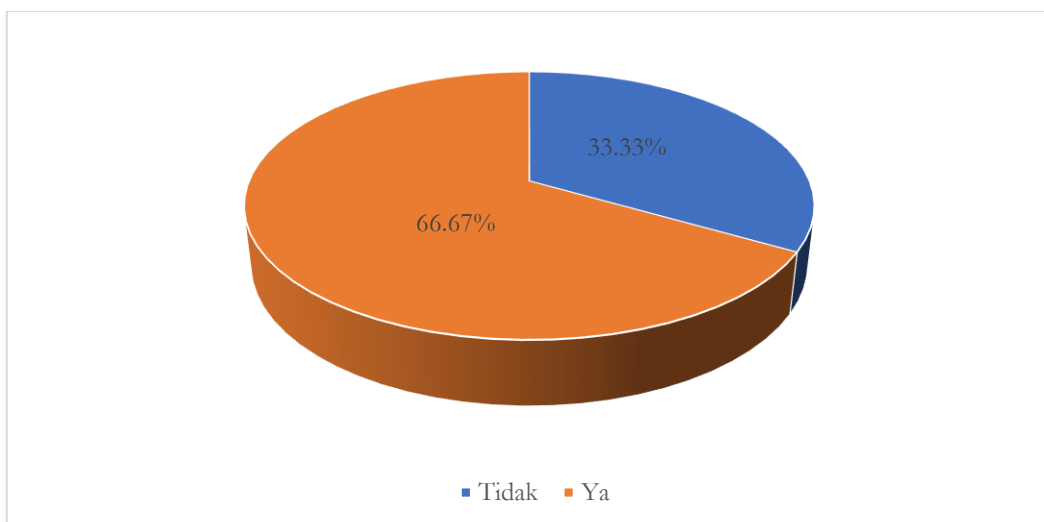
1.3. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Covid-19 Terkait UMKM

Kebijakan pemerintah daerah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Covid-19 serta pemulihan ekonomi pelaku usaha terdampak Covid-19 di tingkat daerah. Bentuk pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menghadapi Covid-19 melalui Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Muara Enim. Penerapan kebijakan ditujukan kepada berbagai macam pelaku ekonomi antara lain tempat usaha dan industri, pasar tradisional, pasar modern, pedagang kaki lima/lapak jajanan, warung makan, cafe, restoran, tempat wisata dan pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Muara Enim juga memberikan Bantuan Modal Langsung Bagi Usaha Mikro Kecil Terdampak pandemi Covid-19. Bantuan modal diberikan kepada UMKM yang paling terdampak setelah melalui proses verifikasi.



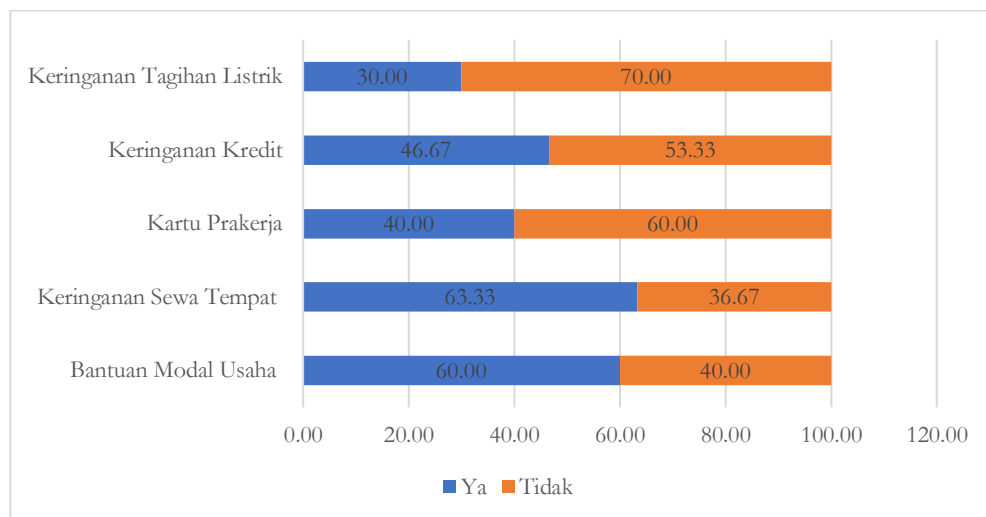
Gambar 11. Pengetahuan UMKM Terhadap Kebijakan Pemerintah
 Sumber: Data Diolah (2022)

Hasil data yang diperoleh menunjukkan sebanyak 63,33 persen UMKM mengetahui tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Informasi dari data yang diperoleh juga menunjukkan kebijakan apa saja yang diketahui oleh pelaku UMKM dan berkaitan secara langsung dengan kegiatan UMKM. Kebijakan tersebut yaitu penerapan protokol kesehatan dimana pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana atas kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang, dan upaya pembatasan jam operasional usaha. Namun, masih terdapat sebagian UMKM di kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas yang dijadikan sebagai sampel belum mengetahui kebijakan pemerintah daerah terutama kebijakan Bantuan Modal Langsung Bagi Usaha Mikro Kecil Terdampak Covid-19.



Gambar 12. Pengetahuan UMKM Terkait Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
 Sumber: Data Diolah (2022)

Sosialisasi kebijakan mempunyai manfaat penting untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada UMKM. Hasil data yang diperoleh menunjukkan sebanyak 66,6 persen UMKM mengetahui tentang sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui petugas pasar maupun surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim. Sebagian besar UMKM mengetahui sosialisasi yang dilakukan, namun informasi yang disebarkan belum merata. Masih ada sebagian UMKM yang belum mengetahui tentang sosialisasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, hal tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada pelaku UMKM di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas.

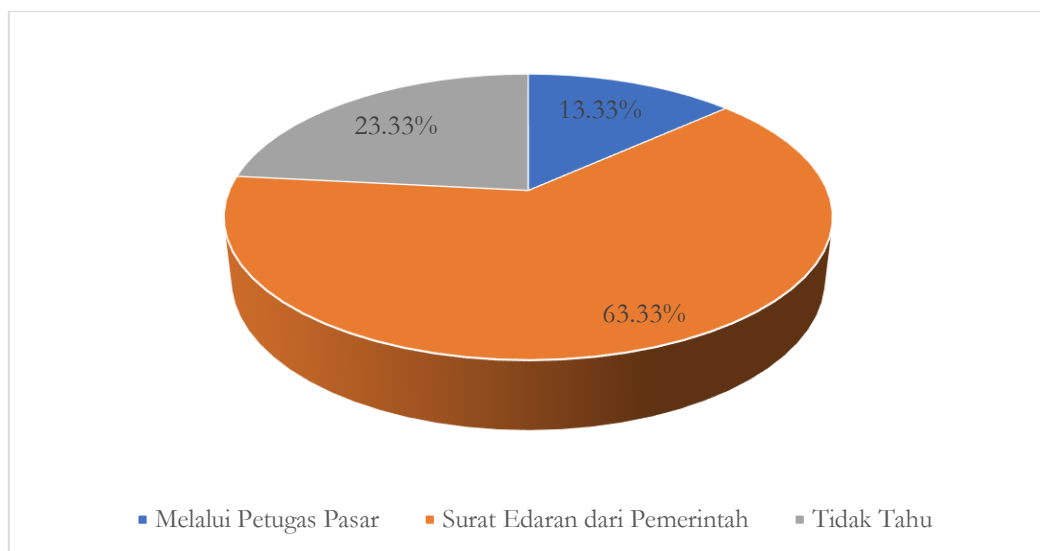


Gambar 13. Penerimaan Program Pemerintah Bagi UMKM di Kabupaten Muara Enim
Sumber: Data Diolah (2022)

Kondisi ekonomi di tingkat daerah mengalami perubahan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan dan aktivitas UMKM di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul dan Ujan Mas. Pemerintah daerah berupaya menyediakan sejumlah program pemulihan melalui kebijakan keringanan kredit, bantuan modal usaha, dan program keringanan lainnya untuk menstimulus UMKM yang terdampak Covid-19 selama pandemi. Hasil data yang diperoleh menunjukkan UMKM yang menerima keringanan tagihan listrik sebanyak 30 persen UMKM, keringanan kredit sebanyak 46,47 persen UMKM, Kartu Pra Kerja sebanyak 40 persen UMKM, keringanan sewa tempat sebanyak 63,33 persen, bantuan modal usaha sebanyak 60 persen UMKM. Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah

terhadap UMKM. Tidak meratanya penyaluran bantuan dan keringanan untuk pelaku UMKM menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses informasi bantuan UMKM menjadi lebih efektif, memperbaiki masalah pendataan dan mekanisme yang tidak tersosialisasi secara optimal.

Semua informasi tentang kebijakan pemerintah agar sampai ke tingkat masyarakat khususnya UMKM dapat dilakukan melalui sosialisasi. Kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan dan sosialisasi yang baik dan efektif. Sosialisasi sebagai instrumen penting dan menjadi bagian dalam implementasi kebijakan sehingga seluruh pelaku UMKM mendapatkan akses informasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Perlu diterapkan mekanisme sosialisasi yang optimal oleh pemerintah daerah.



Gambar 14. Sumber Pengetahuan Terkait Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
Sumber: Data Diolah (2022)

Hasil data yang diperoleh menunjukkan UMKM mendapatkan informasi sosialisasi melalui sumber surat edaran pemerintah sebanyak 63,33 persen UMKM, melalui petugas pasar sebanyak 23,33 persen UMKM dan sebanyak UMKM 13,33 persen tidak tahu. Hal tersebut menunjukkan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum optimal. Masih terdapat sebagian UMKM yang belum mendapatkan informasi kebijakan dan sumber penggunaan berbagai media sosialisasi untuk menyalurkan informasi belum maksimal.

2. Program Di bidang UMKM Menurut Instansi Terkait

Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim untuk mendukung UMKM telah ditunjukkan dalam berbagai kebijakan dan program selama pandemi Covid-19. Namun program yang telah dilaksanakan perlu dioptimalkan dengan upaya terstruktur untuk menyinergikan program dan kegiatan pengembangan UMKM antarsektor. Berbagai program dan kebijakan untuk UMKM di Kabupaten Muara Enim telah diselenggarakan oleh berbagai dinas terkait. Sinkronisasi antara masalah UMKM selama pandemi dan program yang ingin dilaksanakan sangat penting untuk pemulihan UMKM terdampak Covid-19. Oleh karena itu, bagian ini akan memuat analisis rekomendasi model kebijakan dan program pemberdayaan UMKM berdasarkan data permasalahan yang diperoleh oleh pelaku UMKM. Situasi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM saat ini berdasarkan hasil kajian yang diperoleh dengan pemangku kebijakan pengembangan di Kabupaten Muara Enim, yaitu:

**Tabel 8 Kebijakan di Instansi
Kabupaten Muara Enim terkait UMKM disaat Pandemi Covid-19**

No	Instansi	Program
1	Dinas Ketahanan Pangan	1. Pembentukan satuan tugas ketahanan pangan di daerah
		2. Program Microgreen untuk Ketahanan Gizi Keluarga
2	Dinas Perikanan	1. Bantuan sarana budi daya ikan
		2. Bantuan produk olahan
		3. Bantuan sarana nelayan
3	Dinas PPPA Kab Muara Enim	1. Perda No 2 tahun 2022 tentang pengaruh utaman Gender. Perbup No 10 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pengurusan utamaan gender dalam Kab Muara Enim
		2. Peningkatan kompetensi pelaku usaha perempuan dalam membuat produk, pemasaran dan manajemen keuangan.
4	Bappeda Muara Enim	Sisi Anggaran dana insentif daerah (bantuan Sarana) dan Bantuan tidak terduga (bantuan modal)
5	Dinas Perindustian	Kebijakan pengurangan biaya sewa kios/los kepada pelaku usaha khususnya di pasar. Membentuk "Gerai Oleh-oleh" sebagai etalase/wadah hasil-hasil produk dari Muara Enim yang siap bersaing. Pelaku usaha diikutsertakan dalam kegiatan pameran usaha tingkat nasional.
6	Dinas Koperasi dan UMKM	Bantuan modal diberikan kepada UMKM yang paling terdampak
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program perlindungan sosial dalam bentuk BLT terkait pemulihan ekonomi,

No	Instansi	Program
8	Dinas Pertanian	1. Memberikan bantuan peralatan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian
		2. Melakukan pembinaan kepada petani cabai dan industri rumahan saus tomat
9	CSR Bukit Asam	1. Bukit Asam melakukan mitra binaan pada beberapa UMKM
		2. Program Sentra Industri Bukit Asam (SIBA)

Sumber: FGD dengan OPD di Kabupaten Muara Enim (2022)

Berbagai program dan kebijakan untuk UMKM di Kabupaten Muara Enim telah diselenggarakan oleh berbagai dinas terkait. Sinkronisasi antara masalah UMKM selama pandemi dan program yang ingin dilaksanakan sangat penting untuk pemulihan UMKM terdampak Covid-19. Oleh karena itu, bagian ini akan memuat analisis rekomendasi model kebijakan dan program pemberdayaan UMKM berdasarkan data permasalahan yang diperoleh oleh pelaku UMKM. Aspek keuangan dan aspek non-keuangan menjadi masalah yang harus diatasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap UMKM terkait permasalahan dan hambatan yang dialami selama pandemi Covid-19. Berikut kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim guna mencapai target dalam tujuan mendukung pemulihan UMKM, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM
2. Meningkatkan akses UMKM terhadap Lembaga keuangan
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung aktivitas UMKM
4. Menciptakan ekosistem ekonomi digital dalam rangka mendorong digitalisasi UMKM

Pada setiap kebijakan pemulihan UMKM disusun strategi berupa rencana aksi program yang akan dilaksanakan dan instansi pelaksana atau pemangku kebijakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang disusun antara lain:

1. Perluasan akses pasar

Rencana aksi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan konsumsi produk UMKM bagi masyarakat dengan cara digitalisasi UMKM untuk memperluas marketplace melalui program peningkatan sarana dan prasarana bagi usaha mikro terdampak Covid-19 oleh Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Kominfo.

2. Pengembangan kewirausahaan

Rencana aksi yang dapat dilakukan yaitu pendampingan teknis dengan cara menyediakan layanan ahli pendampingan usaha terkait manajemen, produksi, pemasaran,

keuangan, dan SDM. Meningkatkan akselerasi melalui fasilitasi akses teknologi, inovasi, dan perluasan pasar. Adapun program yang dapat dilaksanakan yaitu pengembangan kewirausahaan, peningkatan kualitas SDM usaha mikro, kecil dan menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian. CSR bukit Asam.

3. Akselerasi pembiayaan dan investasi

Rencana aksi yang dapat dilakukan yaitu memperkuat infrastruktur pembiayaan dengan cara memastikan implementasi alokasi 20 persen kredit perbankan umum untuk UMKM, memperkuat literasi keuangan kepada UMKM dan memperkuat Lembaga penjaminan kredit dan simpanan, penyempurnaan regulasi pembiayaan investasi UMKM melalui pembiayaan non-bank. Adapun program yang dapat dilakukan yaitu UMKM yang terdampak didukung dengan bantuan modal usaha, usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola kur, pengembangan akses permodalan sektor non-perbankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

4. Koordinasi lintas sektor

Rencana aksi yang dapat dilakukan yaitu One Gate Policy dengan cara menyusun strategi pengembangan UMKM, mendorong sensus dan survei berkala untuk penyempurnaan data UMKM. Adapun program yang dapat dilakukan yaitu penyusunan dan evaluasi program dan pengembangan UMKM, memperbaiki sistem data jumlah dan karakteristik pelaku usaha UMKM. Meningkatkan dan mengawasi program bantuan sosial UMKM terdampak Covid-19 untuk mengurangi potensi kesalahan penghitungan target penerima bantuan usaha mikro dan kecil. Mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan oleh berbagai jenis UMKM. Berbagai program ini dapat dilaksanakan oleh Pemkab Muara Enim, Bappeda Muara Enim, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Dinas Kominfo. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. Transformasi Ekonomi Digital

Rencana aksi yang dapat dilakukan yaitu inovasi UMKM, digitalisasi UMKM dan kebijakan pengembangan ekonomi digital. Adapun program yang dapat dilaksanakan yaitu menyediakan infrastruktur digital yang memadai, pengembangan ekonomi lokal berbasis sistem digital, UMKM Go-Online oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Dinas Kominfo.

E. Simpulan Dan Saran

Covid-19 secara umum berdampak pada perekonomian di Muara Enim terutama pada fase awal (tahun 2020), sebagai akibat diberlakukannya PSBB. Kebijakan PSBB secara tidak langsung telah mengganggu rantai pasok (*supply chain*) barang dan jasa, dan berimplikasi pada terhambatnya persediaan barang dan jasa. Hal ini terlihat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 0.03 persen.

Pada tahun 2021, industri pengolahan terkoreksi cukup tajam dengan pertumbuhan hanya sebesar 1,76 persen, jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9 persen. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan, sebelum adanya Covid-19 rata-rata pendapatan pelaku usaha pada interval 3-5 juta per bulan, namun setelah Covid-19 menjadi kurang dari 3 juta. Penurunan ini berhubungan erat dengan meningkatnya biaya operasional. Rata-rata pelaku usaha telah mengalami penurunan omzet, untuk menutupi biaya operasional sebagian pelaku UMKM menggunakan modal usaha agar bisa bertahan.

Kondisi ini mendorong pelaku UMKM melakukan rasionalisasi dengan mengurangi jumlah jam kerja dan pengurangan gaji pegawai. Dua strategi ini berdampak pada penurunan pendapatan pekerja sektor UMKM. Namun demikian Covid-19 telah mendorong peningkatan penggunaan digital teknologi dalam kegiatan bisnis UMKM. Hasil kajian menunjukkan sebanyak 14 persen pelaku UMKM ketika pandemi memanfaatkan digitalisasi.

Beberapa rekomendasi dalam kajian ini yaitu:

- 1) Dalam jangka pendek pemerintah daerah memberikan insentif fiskal kepada pelaku UMKM yaitu: a). keringanan sewa tempat usaha, b) bantuan modal, c) pengurusan legalitas produk.
- 2) Pemerintah daerah mendorong optimalisasi gerai produk yang telah ada dengan variasi produk dengan cara: a) melakukan even promosi produk unggulan setiap daerah, b) merintis rumah kemasan bagi pelaku yang mengalami kesulitan dalam *packing* produk.
- 3) Mendorong digitalisasi ekonomi dengan sosialisasi *web* yang telah ada ke pelaku UMKM, dan melakukan pendampingan dalam pemanfaatan digitalisasi produk.